

**ANALISIS REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Kristina Widayaningsih

NIM : 022114009

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2006

Skripsi

**ANALISIS REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)**

Oleh:

Kristina Widyaningsih

NIM: 022114009

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal: 30 Agustus 2006



Drs. Edi Kustanto, M.M.

Pembimbing II

Tanggal: 20 September 2006



Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.

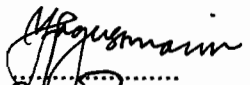


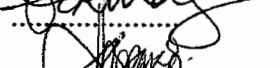
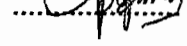
Skripsi

**ANALISIS REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Kristina Widayaningsih
NIM : 022114009

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada tanggal 11 Oktober 2006
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Sekretaris : Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	
Anggota : Drs. Edi Kustanto, M.M.	
Anggota : Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.	
Anggota : Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.	

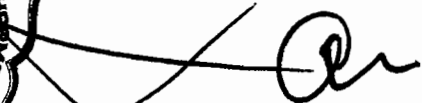
Yogyakarta, 31 Oktober 2006

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,




Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini
Aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat
aku bertekuk

Bapa yang selalu memben saat aku meminta
Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk
Bapa yang punya rancangan yang terbaik dalam hidupku

Skripsi ini kusembahkan untuk:

- Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu menyertaku
 - Bapak dan Ibu yang tercinta
 - Kakakku Ana dan Adikku Albert yang tersayang
 - Teman-teman akuntansi angkatan 2002
- Anak kopel 12: K'Wanti, K'Eno, Ari, Yuli, Brenda, Freska, Mega
 - Semua yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 16 September 2006

Penulis,

Kristina Widyaningsih

ABSTRAK

ANALISIS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)

**Kristina Widayaningsih
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2006**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah realisasi APBD sudah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta; dan untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah dilihat dari realisasi pendapatan daerah.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada pemerintah Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis varians dan rasio kemandirian. Analisis varians dilakukan dengan membandingkan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan serta membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Sedangkan rasio kemandirian dilakukan dengan membandingkan antara PAD dengan Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Anggaran pendapatan daerah pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2001-2004 lebih kecil dari realisasinya, berarti dapat dikatakan realisasi pendapatan daerah tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan selisih antara anggaran dan realisasinya ini bersifat meningkat (menguntungkan). 2) Anggaran belanja daerah pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 2001-2004 lebih besar dari realisasinya, berarti realisasi belanja daerah tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan selisih antara anggaran dan realisasinya ini bersifat menguntungkan. 3) Tingkat kemandirian pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 2001-2004 rata-rata sebesar 25,95% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah Kota Yogyakarta masih tergolong rendah.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF REGIONAL GOVERNMENT BUDGET (APBD) REALIZATION (A case study at Yogyakarta Municipality Government)

**Kristina Widayaningsih
Sanata Dharma University
Yogyakarta 2006**

The aim of this research were to know whether the APBD realization was already in accordance with the budget determined by the Yogyakarta Municipality Government; and to know the regional independence enhancement as seen from regional income realization.

The type of this research was case study at Yogyakarta Municipality Government. The data collection techniques were literature study, interview, and documentation. The data analysis techniques were variance analysis, and independence ratio. The variance analysis was done by comparing the income realization and planned income; and comparing the expenditure realization and the planned one. Whereas, independence ratio was done by comparing PAD with Central/Province Government's funding and loans.

The research's result showed that 1) Yogyakarta Municipality Government's income budget in 2001-2004 was less than the realization, it meant that regional income realization was inappropriate with the budget and the difference between the estimate and realization was increasing (profitable) 2) The expenditure budget of the Yogyakarta Municipality Government in 2001-2004 was bigger than the realization, it meant the expenditure realization was inappropriate with the budget and the difference between budget and this realization was profitable. 3) The independence enhancement average of Yogyakarta Municipality Government in 2001-2004 was 25,95%/year. It showed the independence level of Yogyakarta Municipality Government was in low level.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Bapa di surga atas segala berkat dan rahmatnya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta).” Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari pihak lain, skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Dr. Ir. P. Wiryono P., S.J. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah menerima saya sebagai bagian dari Keluarga Besar Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran studi saya selama kuliah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ir. Drs. Hansiadi Y.H, M.Si., Akt. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan bantuan, semangat, nasihat dalam penyusunan skripsi ini.

4. Drs. Edi Kustanto, M.M. selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memberi bimbingan, masukan, dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberi bimbingan, masukan, dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan perbaikan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf BPKD Kota Yogyakarta atas semua kebaikan dan bantuannya kepada penulis dalam mencari data sampai selesainya penulisan skripsi ini.
8. Para Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah.
9. Semua karyawan di sekretariat Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, pojok BEJ, dan perpustakaan yang telah membantu penulis selama kuliah.
10. Bapak (Al.Supriadi) dan Ibu (Y.Sumarsih) tercinta, kakakku Ana, dan adikku Albert yang tidak pernah lelah memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Berkat Allah selalu beserta kalian.
11. Sr. Benedicte, C.B. selaku pimpinan asrama Syantikara yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan, dan sarana dan prasarana selama saya studi di Yogyakarta.

12. Sahabatku Brenda yang banyak mengedit kata-kata yang kurang benar dalam skripsiku dan dengan sukarela meminjamkan laptop kepada penulis selama mengerjakan skripsi.
13. Teman-teman ku: Ari “Sapi”, Yappy, Dyah P.E, Mitha, dan Gagat . Terima kasih untuk masukan dan saran yang telah kalian berikan dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman MPT: Agnes, Rita, Wulan, Yuli, Ninik, Mbak Ana, Mbak Arum, Bayu, Andi, Budi, Doni dan Mas Wiwid. Terima kasih untuk masukan dan saran yang telah kalian berikan dalam penyusunan proposal skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebut namanya satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Tuhan Yesus memberkati.

Yogyakarta, 16 September 2006

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. LANDASAN TEORI.....	6
A. Otonomi Daerah.....	6
B. Keuangan Daerah.....	7

C. Siklus Anggaran	9
D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	11
1. Pengertian APBD	11
2. Karakteristik dan Unsur-unsur APBD	12
3. Fungsi APBD	14
4. Struktur APBD	15
E. Sumber Keuangan Daerah.....	18
F. Penilaian Kinerja Pemerintah.....	20
G. Penilaian Laporan Kinerja Finansial (APBD).....	22
H. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	23
I. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	24
BAB III. METODA PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Tempat dan Waktu Penelitian	26
C. Subyek dan Obyek Penelitian	26
D. Data yang Diperlukan	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV. GAMBARAN UMUM	34
A. Sejarah Singkat Berdirinya Kota Yogyakarta.....	34
B. Kondisi Geografis	35
C. Iklim	36

D. Pemerintah Daerah	37
E. Keuangan Daerah	37
F. Pembagian Wilayah	38
G. Kependudukan.....	38
H. Tenaga Kerja	40
I. Transmigrasi.....	41
J. Produk Domestik Regional Bruto	41
K. Kekayaan Alam.....	42
L. Ekonomi	43
BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	45
A. Deskripsi Data.....	45
B. Analisis Data	46
C. Pembahasan.....	58
BAB VI. PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Keterbatasan Penelitian.....	73
C. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Analisis Varians	29
Tabel III.2	Sifat dari Selisih Anggaran Pendapatan jika Dibandingkan Dengan Realisasinya	30
Tabel III.3	Sifat dari Selisih Anggaran Pengeluaran/Belanja jika Dibandingkan Dengan Realisasinya	31
Tabel III.4	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	32
Tabel IV.1	Jarak antara Balaikota Yogyakarta dengan Kantor Kecamatan	38
Tabel IV.2	Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk di Kota Yogyakarta	39
Tabel IV.3	Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta	40
Tabel V.1	Ringkasan Perhitungan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Yogyakarta TA. 2001-2002	47
Tabel V.2	Ringkasan Perhitungan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Yogyakarta TA. 2003-2004	47
Tabel V.3	Analisis Varians Pendapatan TA. 2001	48
Tabel V.4	Analisis Varians Pendapatan TA. 2002	48
Tabel V.5	Analisis Varians Pendapatan TA. 2003	49
Tabel V.6	Analisis Varians Pendapatan TA. 2004	49
Tabel V.7	Kesimpulan Analisis Varians Pendapatan TA. 2001	50

Tabel V.8	Kesimpulan Analisis Varians Pendapatan TA. 2002	50
Tabel V.9	Kesimpulan Analisis Varians Pendapatan TA. 2003	50
Tabel V.10	Kesimpulan Analisis Varians Pendapatan TA. 2004	51
Tabel V.11	Ringkasan Perhitungan Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Yogyakarta TA. 2001-2002	52
Tabel V.12	Ringkasan Perhitungan Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Yogyakarta TA. 2003-2004	52
Tabel V.13	Analisis Varians Belanja TA. 2001	53
Tabel V.14	Analisis Varians Belanja TA. 2002	53
Tabel V.15	Analisis Varians Belanja TA. 2003	54
Tabel V.16	Analisis Varians Belanja TA. 2004	54
Tabel V.17	Kesimpulan Analisis Varians Belanja TA. 2001	55
Tabel V.18	Kesimpulan Analisis Varians Belanja TA. 2002	55
Tabel V.19	Kesimpulan Analisis Varians Belanja TA. 2003	55
Tabel V.20	Kesimpulan Analisis Varians Belanja TA. 2004	55
Tabel V.21	Perkembangan Realisasi PAD Kota Yogyakarta TA. 2001-2004	56
Tabel V.22	Perkembangan Realisasi Total Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman Pemerintah Kota Yogyakarta TA. 2001-2004	57
Tabel V.23	Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta TA. 2001-2004	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah menjadi Undang-undang No.32 tahun 2004 dan Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diubah menjadi Undang-undang No.33 Tahun 2004, telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan di daerah. Hal ini terjadi karena kedua undang-undang tersebut telah memberikan otonomi yang luas kepada suatu daerah dalam mengelola pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap daerah memiliki hak penuh dalam mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan dan menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Pengaturan pemasukan maupun penggunaan dana tidak lagi tergantung pemerintah pusat, pengaturan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Setiap daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan penyusunan anggaran daerah, menggunakan sumber-sumber ekonomi dan potensi daerah yang dimiliki, serta berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran daerah kepada masyarakat. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian

daerah. Dengan adanya kewenangan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi dan potensi daerahnya masing-masing, supaya pemerintah daerah bisa benar-benar mandiri dan tidak lagi tergantung pada pemerintah pusat. Selain itu, pelimpahan wewenang tersebut juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang memiliki beberapa karakteristik, antara lain: transparansi, akuntabilitas publik, efisien (berdaya guna), dan efektif (berhasil guna) (Mardiasmo, 2002:18).

Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik dan aturan otonomi daerah yang berlaku, pemerintah daerah berkewajiban untuk mempublikasikan laporan kinerja keuangan berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan. Realisasi APBD merupakan cerminan kinerja dan kemampuan daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Perbandingan antara realisasi APBD dengan APBD yang termuat dalam laporan perhitungan APBD masih jauh dari harapan, hal ini dapat dilihat dari realisasi PAD (indikator kinerja pendapatan) yang lebih rendah jika dibandingkan dengan komponen pendapatan yang lain, dan pendapatan daerah yang tidak sebanding dengan pengeluaran/belanja pemerintah daerah. Keadaan di atas menunjukkan lemahnya pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah. Dalam jangka panjang keadaan tersebut dapat mempertinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya daerah tersebut belum mandiri dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah karena tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah realisasi pendapatan daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan?
2. Apakah realisasi pengeluaran/belanja daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan?
3. Bagaimanakah tingkat kemandirian daerah Pemerintah Kota Yogyakarta dilihat dari realisasi pendapatan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah realisasi APBD dari tahun 2001 – 2004 sudah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Dari realisasi pendapatan daerah peneliti juga ingin mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Yogyakarta setelah diberlakukanya otonomi daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menentukan kebijakan keuangan dalam APBD, serta sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan bacaan, wawasan, dan pengetahuan, baik bagi mahasiswa USD maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap topik yang diteliti oleh penulis.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk memperdalam dan menerapkan teori-teori mengenai keuangan daerah dan APBD yang diperoleh selama dibangku kuliah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan Otonomi daerah, dan keuangan daerah. Kemudian akan dibahas pula tentang siklus anggaran di dalam pemerintahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber keuangan daerah, penilaian kinerja pemerintah, penilaian laporan kinerja finansial (APBD), rasio kemandirian keuangan daerah, serta pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah.

BAB III : METODA PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Bab ini berisi tentang situasi dan kondisi Kota Yogyakarta secara umum meliputi sejarah singkat berdirinya Kota Yogyakarta, kondisi geografis, iklim, pemerintah daerah, pembagian wilayah, kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi, transportasi, pos dan komunikasi, kekayaan alam, nilai-nilai budaya, dan ekonomi.

BAB V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang diskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian, serta saran-saran yang diperlukan yang berkaitan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

Istilah otonomi diambil dari bahasa Yunani yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Kartasmita (1996:346) mendefinisikan otonomi sebagai “pemberian kewenangan dalam mengambil keputusan dan pengelolaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dengan peraturan undang-undang.

Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 Bab I Pasal 2 butir b menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Daerah otonom seperti dijelaskan dalam pasal 1 butir h adalah “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Adapun ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber

keuangan besar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara (Umbara, 2004).

B. Keuangan Daerah

Pengertian Keuangan Daerah menurut Mamesah (1995:16) adalah:

Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Lingkup keuangan daerah meliputi (Mamesah, 1995:21-22):

- a. kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah sesuai tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan.
- b. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan yaitu seluruh uang dan barang yang pengurusannya tidak dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah yang juga berfungsi sebagai kas daerah.

Asas-asas keuangan daerah menurut Mamesah (1995:35-36) yaitu:

- a. Desentralisasi

Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan menyangkut segi-segi pembiayaannya.

b. Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat daerah.

c. Tugas Pembantuan

Tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002:105) adalah:

a. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

c. *Value for Money*

Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

C. Siklus Anggaran

Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran harus diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Pada dasarnya siklus anggaran terdiri atas empat tahap (Mardiasmo, 2002:211), yaitu:

1. Tahap persiapan dan penyusunan anggaran;

Pada tahap persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) yang cukup tinggi. Oleh

sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya suatu mata anggaran sangat tergantung pada teknik dan sistem anggaran yang digunakan. Besarnya mata anggaran pada suatu anggaran yang menggunakan "*line-item budgeting*," akan berbeda pada "*performance budgeting*," "*input-output budgeting*," "*program budgeting*," atau "*zero based budgeting*."

2. Tahap ratifikasi;

Pada tahap ini pimpinan eksekutif (kepala daerah) dituntut tidak hanya memiliki "*managerial skill*" namun juga harus mempunyai "*political skill*," "*salesmanship*," dan "*coalition building*" yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap implementasi

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

Sistem akuntansi yang digunakan hendaknya juga mendukung pengendalian anggaran.

4. Tahap pelaporan dan evaluasi

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui banyak masalah.

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

Pengertian anggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkiraan; perhitungan; atau taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang yang dinyatakan dengan angka, biasanya adalah satuan uang. Anggaran pendapatan diartikan sebagai perkiraan atau perhitungan banyaknya uang yang akan diterima, sedangkan anggaran belanja diartikan sebagai perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk suatu keperluan.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu rencana keuangan

tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengertian Anggaran dan Belanja Daerah menurut Mamesah (1995:20) adalah:

Rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

APBD menurut Halim (2002:24) adalah: Rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa APBD adalah rencana kerja pemerintah daerah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

2. Karakteristik dan Unsur-unsur APBD

Karakteristik APBD (Halim, 2002:17) di era pra reformasi antara lain:

- a. APBD disusun oleh DPRD bersama-sama Kepala Daerah (pasal 30 UU No.5/1975).
- b. Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah pendekatan *line item* atau pendekatan tradisional. Dalam pendekatan ini anggaran disusun berdasarkan jenis penerimaan dan pengeluaran. Penggunaan

pendekatan ini bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tradisional (tertua) diantara berbagai pendekatan penyusunan anggaran.

- c. Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah tingkat I dan kepada Gubernur untuk pemerintah Daerah Tingkat II. Oleh Karena itu pertanggungjawaban bersifat vertikal.
- d. Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan dan tahap penyusunan dan penetapan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan bersifat keuangan. Hal ini tampak pada pengawasan pendapatan daerah dan pengawasan pengeluaran daerah.
- e. Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan tiga unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan unsur hasil program (untuk proyek-proyek daerah).
- f. Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan tata buku anggaran (*stelsel cameral*). Menurut sistem pembukuan (*stelsel*) ini, penyusunan anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Adapun unsur-unsur APBD (Halim, 2002:16) adalah:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
 - b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
 - c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
 - d. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.
4. Fungsi APBD

Adapun fungsi APBD (Mamesah, 1995:18) adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada masyarakat daerah yang bersangkutan.
- b. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- c. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah umumnya dan kepada daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijakan Pemerintah Daerah.
- d. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
- e. Merupakan suatu pemberian yang kuasa kepada kepala daerah di dalam batas-batas tertentu.

5. Struktur APBD

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi penerimaan kas daerah. Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus (MEP-UGM, 2003:3).

Struktur APBD sebagai satu kesatuan pendapatan, belanja dan pembiayaan diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap bidang pemerintahan dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah (satuan/unit kerja).

Susunan Pendapatan Daerah (MEP-UGM, 2003:4):

- a. Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan.
- b. Kelompok pendapatan terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- c. Setiap Kelompok Pendapatan dirinci lebih lanjut menurut jenis pendapatan. Misal kelompok Pendapatan Asli Daerah dirinci ke dalam jenis pendapatan berupa: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- d. Setiap jenis pendapatan dirinci lebih lanjut menurut obyek pendapatan. Misal jenis pendapatan: Pajak Daerah dirinci lebih lanjut ke dalam obyek

pendapatan berupa: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, dan pajak parkir.

- e. Setiap obyek pendapatan dirinci lebih lanjut menurut rincian obyek pendapatan. Misal obyek pendapatan: Pajak Kendaraan Bermotor dirinci lebih lanjut ke dalam rincian obyek pendapatan berupa sedan, jeep, station wagon, kendaraan roda 2, kendaraan roda 3, dan kendaraan khusus.

Susunan Belanja Daerah (MEP-UGM, 2003:6):

- a. Belanja Daerah dirinci menurut bagian, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- b. Bagian Belanja terdiri atas: Aparatur Daerah dan Pelayanan Publik.
- c. Bagian Belanja Aparatur Daerah dan Pelayanan Publik dirinci lebih lanjut ke dalam kelompok belanja yang terdiri atas: Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal.
- d. Bagian Belanja Pelayanan Publik dirinci lebih lanjut ke dalam kelompok belanja yang terdiri atas: Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Tersangka.
- e. Kelompok Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan dirinci lebih lanjut ke dalam jenis belanja: Belanja

Pegawai/personalia, Belanja Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.

- f. Kelompok Belanja Modal dirinci lebih lanjut menurut jenis belanja, antara lain berupa: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Jaringan, Belanja Modal Instalasi, Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Air (irigasi), Belanja Modal Gedung dan lainnya.
- g. Setiap jenis belanja dirinci lebih lanjut menurut obyek belanja. Misal jenis belanja pegawai dirinci lebih lanjut menurut obyek belanja antara lain berupa: Gaji dan Tunjangan Pegawai, Tunjangan Khusus Pegawai, Intensif, Honorarium dan Upah.
- h. Setiap obyek belanja dirinci lebih lanjut menurut rincian obyek belanja. Misal obyek Belanja: Gaji dan Tunjangan Pegawai dirinci lebih lanjut ke dalam rincian obyek belanja antara lain berupa: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan.

Susunan Pembiayaan (MEP-UGM, 2003:8):

- a. Pembiayaan dirinci menurut kelompok, jenis, dan obyek pembiayaan.
- b. Kelompok Pembiayaan terdiri atas: penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.
- c. Kelompok Pembiayaan dirinci lebih lanjut ke dalam jenis pembiayaan. Misal kelompok pembiayaan penerimaan daerah dirinci lebih lanjut ke dalam jenis pembiayaan antara lain berupa: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, dan penjualan aset daerah yang dipisahkan.

- d. Jenis pembiayaan dirinci lebih lanjut ke dalam obyek pembiayaan. Misal jenis pembiayaan: penerimaan pinjaman dan obligasi dirinci lebih lanjut ke dalam obyek pembiayaan antara lain berupa: pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

E. Sumber Keuangan Daerah

Dalam hal Keuangan Daerah, rumusan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 agak mirip dengan rumusan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (Marbun, 2005:171).

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah yang disebut PAD, yaitu:
 - a. hasil pajak daerah;
 - b. hasil retribusi daerah
 - c. hasil pengelolaan kekayaan-kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi (Marbun, 2005:173). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara

pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan utuh (Marbun, 2005:174).

a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Dana Bagi Hasil bersumber dari:

1) Pajak

- a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b) Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c) Pajak Penghasilan (PPh)

2) Sumber Daya Alam

- a) Kehutanan
- b) Pertambangan umum
- c) Perikanan
- d) Pertambangan Minyak Bumi
- e) Pertambangan Gas Bumi
- f) Pertambangan Panas Bumi.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk *block grant* yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah (MEP-UGM, 2003:5). Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah melalui formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Marbun, 2005:175).

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah yang pemanfaatannya untuk suatu tujuan tertentu/khusus, misalnya: DAK untuk reboisasi, DAK untuk bidang-bidang tertentu (MEP-UGM, 2003:5). Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Marbun, 2005:176).

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Pasal 157), meliputi:
 - a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang atau jasa oleh Daerah.

F. Penilaian Kinerja Pemerintah

Kinerja menurut Bastian dalam Astuti (2003:21) didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi

organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Sedangkan penilaian kinerja didefinisikan sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan pengambilan keputusan, sebagai alat untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun tujuan diadakannya pengukuran kinerja pemerintah (Astuti, 2003:22) adalah:

1. Pengukuran kinerja pemerintah ditujukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Pengukuran kinerja pemerintah ditujukan untuk pengalokasian dana dan pembuatan keputusan.
3. Pengukuran kinerja pemerintah ditujukan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik.

Adapun langkah-langkah dalam penilaian kinerja menurut Sunarni dalam Astuti (2003) adalah:

1. Penetapan variabel kunci

Variabel kunci merupakan faktor-faktor yang menentukan kesuksesan atau kegagalan suatu unit kerja.

2. Penetapan indikator kinerja

Indikator kinerja merupakan ukuran tingkat capaian kinerja. Indikator kinerja juga merupakan indikator pelaksanaan strategi yang ditetapkan, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk biaya.

3. Penetapan target atau standar kinerja

Untuk dapat menilai apakah kegiatan berhasil atau tidak, perlu adanya pembandingan atau pedoman yang sering disebut dengan standar. Pembandingan yang digunakan adalah target yang ditetapkan sebelumnya. Penetapan target dapat

menggunakan dasar kinerja tahun lalu, kinerja yang diharapkan terjadi serta kinerja pihak luar.

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan rencana atau anggaran. Perbandingan ini perlu ditindaklanjuti dengan analisis untuk menentukan faktor-faktor penyebab munculnya perbedaan.

G. Penilaian Laporan Kinerja Finansial (APBD)

Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan). Pengertian varians (selisih) itu sendiri menurut Kamus Istilah Keuangan dan Investasi (Downes, 1991) adalah perbedaan antara pos-pos yang berkaitan pada suatu neraca dan laporan laba/rugi komparatif; atau dapat juga diartikan sebagai perbedaan antara pengalaman aktual dan pengalaman yang dianggarkan atau diproyeksikan dalam golongan keuangan apapun. Analisis varians dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual (realisasi) dengan yang dianggarkan (Mardiasmo, 2002:123).

Analisis varians secara garis besar berfokus pada (Mardiasmo, 2002:123):

- a. Varians pendapatan (*revenue variance*)
- b. Varians pengeluaran (*expenditure variance*)
 - Varians belanja rutin (*recurrent expenditure variance*)
 - Varians belanja investasi/modal (*capital expenditure variance*)

Dari hasil analisis varians, kemudian dinyatakan dalam bentuk prosentase antara realisasi dengan yang dianggarkan.

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Dari hasil analisis varians dapat diketahui (PAU SE-UGM, 2003), jika:

- a. Rencana anggaran pendapatan lebih besar dari realisasi, maka selisihnya bersifat menurun. Sedangkan pada pengeluaran/belanja jika anggaran lebih besar daripada sesungguhnya terjadi (aktual), maka selisihnya bersifat menguntungkan.
- b. Rencana anggaran pendapatan sama dengan realisasi, maka selisihnya bersifat sama. Sedangkan pada pengeluaran/belanja jika anggaran sama dengan sesungguhnya terjadi (aktual), maka selisihnya sama dengan nol (0). Artinya bahwa dalam mencapai suatu tujuan dilakukan dengan biaya seminimal mungkin dan dalam waktu atau periode sesingkat-singkatnya, dapat diharapkan hasil yang sebesar-besarnya. Jika dikaitkan dengan efisiensi anggaran belanja, dapat diartikan bahwa usaha pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan sudah efisien.
- c. Rencana anggaran pendapatan lebih kecil daripada realisasi, maka selisihnya naik. Sedangkan pada pengeluaran/belanja jika anggaran lebih kecil daripada yang sesungguhnya terjadi (aktual), maka selisihnya bersifat tidak menguntungkan.

H. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar

pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim, 2004:284).

Rasio

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat / Pr opinsi dan Pinjaman}} \times 100 \%$$

I. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Ada empat macam pola hubungan (Paul Hersey dan Kenneth Blanchard) yang memperkenalkan “Hubungan Situasional” yang digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Halim, 2004:188-189), antara lain:

1. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
2. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.

3. Pola Hubungan Partisipatif, peran pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada, karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.



BAB III

METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus, yaitu penelitian terhadap suatu obyek tertentu, dimana data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian : Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Waktu Penelitian : April-Juni 2006

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian :

a. Subyek Penelitian :

- 1) Pemerintah Kota Yogyakarta
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Yogyakarta
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- 4) Badan Pusat Statistik (BPS)

b. Obyek Penelitian :

Obyek yang diteliti adalah laporan perhitungan APBD kota Yogyakarta, yang terdiri dari pendapatan daerah serta belanja daerah dari tahun anggaran 2001 sampai dengan 2004.

D. Data yang Diperlukan

Jenis data yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang memiliki satuan hitung dan dapat dihitung secara sistematis, seperti: laporan perhitungan APBD.
- b. Data kualitatif, yaitu data yang tidak memiliki satuan hitung dan berupa data yang tidak dapat dihitung, seperti: gambaran umum Pemerintah Kota Yogyakarta dan keterangan-keterangan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penulisan dan disarikan dalam bentuk literatur atau jurnal karangan ilmiah, dokumen-dokumen, maupun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara:
 - a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung, untuk memperoleh informasi yang diperlukan mengenai gambaran umum Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat catatan-catatan yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta, BPKD, Bappeda, dan BPS, serta menyalin hal-hal yang dianggap relevan dan perlu untuk mendukung hasil penelitian.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu:

- a. Teknik analisis kuantitatif, yaitu menganalisis data dengan menguji dan menilai setiap data yang dikumpulkan dengan menggunakan rumus dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang didapat bisa dipertanggungjawabkan.
- b. Teknik analisis kualitatif, yaitu teknik menganalisis data dengan berbasis pada data kuantitatif yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

Berikut adalah teknik analisis data untuk menjawab permasalahan yang ada:

1. Teknik analisis data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan pertama adalah:
 - a. Memaparkan data mengenai anggaran dan realisasi pendapatan daerah pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun anggaran 2001-2004.
 - b. Menghitung varians dengan menggunakan analisis varians.

Analisis varians dilakukan dengan membandingkan realisasi (kinerja aktual) dengan yang dianggarkan (Mardiasmo, 2002:123). Analisis varians berfokus pada varians pendapatan.

Dari hasil analisis varians tersebut, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase antara realisasi anggaran dengan yang dianggarkan, yaitu:

$$\text{Varians} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Lebih jelasnya dilakukan dengan menggunakan tabel analisis varians dibawah ini:

Tabel III.1

Analisis Varians

No	Uraian	Jumlah		Varians (Selisih)	%
		Anggaran	Realisasi		

c. Menarik kesimpulan dari hasil analisis varians, yaitu:

1. Bila rencana anggaran pendapatan sama dengan realisasinya, maka dapat dikatakan bahwa anggaran pendapatan sudah sesuai dengan realisasinya.
2. Bila rencana anggaran pendapatan lebih besar dari realisasinya, maka dapat dikatakan bahwa anggaran pendapatan tidak sesuai dengan realisasinya.

3. Bila rencana anggaran pendapatan lebih kecil dari realisasinya, maka dapat dikatakan bahwa anggaran pendapatan tidak sesuai dengan realisasinya.

Tabel III.2

Sifat dari Selisih Anggaran Pendapatan jika Dibandingkan Dengan Realisasinya

Anggaran pendapatan dibandingkan dengan realisasinya	Sifat
Anggaran pendapatan sama dengan realisasinya	Tetap
Anggaran pendapatan lebih besar dari realisasinya	Menurun
Anggaran pendapatan lebih kecil dari realisasinya	Meningkat

Sumber: PAU SE-UGM

Keterangan: Selisih pendapatan yang bersifat menurun dapat diartikan sebagai selisih yang tidak menguntungkan. Sebaliknya, selisih pendapatan yang bersifat meningkat dapat diartikan sebagai selisih yang menguntungkan.

2. Teknik analisis data untuk menjawab permasalahan kedua adalah:
- Memaparkan data mengenai anggaran dan realisasi belanja daerah pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun anggaran 2001-2004.
 - Menghitung varians dengan menggunakan analisis varians.

Analisis varians dilakukan dengan membandingkan antara realisasi (kinerja aktual) dengan yang dianggarkan (Mardiasmo, 2002:123). Analisis varians berfokus pada varians pengeluaran.

Dari hasil analisis varians tersebut, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase antara realisasi anggaran dengan yang dianggarkan, yaitu:

$$\text{Varians} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Lebih jelasnya dilakukan dengan menggunakan tabel analisis varians, yang dapat dilihat di tabel III.1, pada teknik analisis data sebelumnya.

- c. Menarik kesimpulan dari hasil analisis varians, yaitu:
1. Bila rencana anggaran pengeluaran/belanja sama dengan realisasinya, maka dapat dikatakan bahwa anggaran pengeluaran/belanja sudah sesuai dengan realisasinya.
 2. Bila rencana anggaran pengeluaran/belanja lebih besar dari realisasinya, maka dapat dikatakan bahwa anggaran pengeluaran/belanja tidak sesuai dengan realisasinya.
 3. Bila rencana anggaran pengeluaran/belanja lebih kecil dari realisasinya, maka dapat dikatakan bahwa anggaran pengeluaran/belanja tidak sesuai dengan realisasinya.

Tabel III.3

Sifat dari Selisih Anggaran Pengeluaran/Belanja jika Dibandingkan Dengan Realisasinya

Anggaran pengeluaran/belanja dibandingkan dengan realisasinya	Sifat
Anggaran pengeluaran/belanja sama dengan realisasinya	Efisien
Anggaran pengeluaran/belanja lebih besar dari realisasinya	Menguntungkan
Anggaran pengeluaran/belanja lebih kecil dari realisasinya	Tidak Menguntungkan

Sumber: PAU SE-UGM

3. Teknik analisis data yang digunakan untuk menghitung tingkat kemandirian adalah:
 - a. Menjumlahkan komponen-komponen realisasi PAD setiap tahun.
 - b. Menjumlahkan komponen-komponen realisasi bantuan pemerintah/propinsi dan pinjaman setiap tahun.

- c. Menghitung tingkat kemandirian dengan menggunakan rumus rasio kemandirian (Halim, 2004:284).

Rasio kemandirian:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat / Pr opinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

- d. Menarik kesimpulan dari hasil rasio kemandirian tersebut, dengan berpedoman pada tabel pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah.

Tabel III.4

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim, 2004:189

Apabila hasil prosentase kemandirian kurang dari 25% maka pola hubungan dengan pemerintah pusat adalah Instruktif, berarti peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Bila hasil prosentase kemandirian kurang dari 50% maka pola hubungan dengan pemerintah pusat adalah Konsultatif, berarti peranan atau campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang. Bila hasil prosentase kemandirian kurang dari 75% maka pola hubungan dengan pemerintah pusat adalah Partisipatif, berarti kemandirian daerah tersebut mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi, karena peran pemerintah pusat semakin berkurang. Namun bila hasil prosentase kemandirian daerah antara 75% -

100% maka pola hubungan dengan pemerintah pusat adalah Delegatif, berarti campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada. Dan pemerintah daerah dapat dikatakan sudah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Berdirinya Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta didirikan pada tahun 1755. Pada tahun tersebut juga dibangun Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di bekas hutan Bering. Daerah itu berada di antara Sungai Winongo dan Sungai Code, di mana lokasi tersebut nampak strategis menurut segi pertahanan dan keamanan pada waktu itu.

Pemerintah Kota Yogyakarta dibentuk tanggal 7 Juni 1947. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota perjuangan itu bukan dilahirkan oleh penjajahan, melainkan dilahirkan pada masa kemerdekaan. Kota Yogyakarta lahir pada saat perjuangan nasional ketika bangsa Indonesia sedang menegakkan kedaulatan negara setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Presiden Republik Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tanggal 5 September 1945 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan amanat pertama yang menyatakan bahwa daerah Kasultanan dan daerah Pakualaman merupakan daerah istimewa dan menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bertanggungjawab langsung atas keadaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Presiden Republik Indonesia.

Tanggal 30 Oktober 1945 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan amanat yang kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama dengan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia.

Kota Yogyakarta, baik yang menjadi bagian dari Kasultanan maupun Pakualaman, telah mempunyai satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Dewan Pemerintah Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman. Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom karena kekuasaan otonomi yang meliputi bidang pemerintahan masih tetap di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Otonomi diserahkan dengan lahirnya Undang-Undang No.17 tahun 1947 pasal 1 menyatakan bahwa Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah di Kabupaten Bantul sekarang mejadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah ini dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

B. Kondisi Geografis

Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19''-110°28'53'' Bujur Timur dan antara 07°49'26''-07°15'24'' Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5 Km² atau 1,02 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 Km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 Km.

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0-2 %) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100-199 meter dpa. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol.

Secara administratif, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah:

Sebelah Utara : Kabupaten Sleman

Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman

Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

C. Iklim

Secara umum, curah hujan tertinggi tahun 2003 terjadi pada bulan Februari, yaitu sebanyak 244 mm dan terendah terjadi pada bulan Juli dan Agustus (0 mm). Rata-rata dari hujan perbulan adalah 6 hari.

Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 85 persen dan terendah pada bulan September sebesar 72 persen. Tekanan udara rata-rata 1.011,4 mb dan suhu udara rata-rata 26,3°C.

D. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Walikota sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah. DPRD Kota Yogyakarta masa bhakti 2004-2009 terdiri dari 35 orang anggota berasal dari 5 fraksi.

E. Keuangan Daerah

Dalam era otonomi daerah, perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebaiknya menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berimbang berarti harus diusahakannya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Dinamis berarti makin meningkatnya jumlah anggaran dan tabungan pemerintah, sehingga kemampuan daerah bertambah dan ketergantungan pada bantuan akan berkurang.

Pada tahun anggaran 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta mencapai 79.911 juta rupiah, meningkat 16,45 persen dari PAD tahun sebelumnya yaitu sebesar 68.622 juta rupiah. Namun demikian, dibandingkan dengan total belanja daerah kontribusinya hanya 21,58 persen. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat kemampuan daerah masih rendah dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pemerintah Kota Yogyakarta.

F. Pembagian Wilayah

Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 610 RW, dan 2.512 RT dengan luas wilayah 32,5 Km². Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.099.263 hektar dan bagian terkecil berupa lahan kosong seluas 22.287 hektar.

Tabel IV.1

Jarak antara Balaikota Yogyakarta dengan Kantor Kecamatan

Kecamatan	Jarak (Km)
1. Matrijeron	5,5
2. Kraton	4,0
3. Mergangsan	2,0
4. Umbulharjo	1,0
5. Kotagede	1,0
6. Gondokusuman	3,0
7. Danurejan	1,0
8. Pakualaman	1,5
9. Gondomanan	3,0
10. Ngampilan	5,0
11. Wirobrajan	5,0
12. Gedongtengen	5,0
13. Jetis	4,0
14. Tegalrejo	6,0

Sumber: *Monografi Kecamatan se-Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2004*

G. Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000, penduduk Kota Yogyakarta berjumlah 397.398 orang yang terdiri dari 194.530 orang (48,95 persen) laki-laki dan 202.868 orang (51,05 persen) perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1990 sebanyak 412.059 orang. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk periode tahun 1990-2000 sebesar -0,37 persen.

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2000 jumlah penduduk tahun 2004 tercatat 398.004 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah

47,87 persen laki-laki dan 52,13 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk yang lebih kecil dari 100. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 32,50 Km², kepadatan penduduk Kota Yogyakarta 12.246 jiwa per Km².

Tabel IV.2

Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk di Kota Yogyakarta

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk
1. Mantrijeron	15.727	16.932	32.659	12.513
2. Kraton	9.163	10.694	19.857	14.184
3. Mergangsan	14.902	16.586	31.488	13.631
4. Umbulharjo	33.646	35.833	69.479	8.557
5. Kotagede	13.667	14.312	27.979	9.114
6. Gondokusuman	23.138	25.479	48.617	12.185
7. Danurejan	9.418	10.404	19.822	18.020
8. Pakualaman	5.091	5.537	10.628	16.870
9. Gondomanan	6.310	7.625	13.935	12.442
10. Ngampilan	8.137	9.490	17.627	21.496
11. Wirobrajan	13.368	13.325	26.693	15.166
12. Gedongtengen	8.342	9.584	17.926	18.673
13. Jetis	12.582	13.456	26.038	15.316
14. Tegalrejo	17.045	18.211	35.256	12.115
Jumlah/Total	190.536	207.468	398.004	12.246

Sumber: BPS Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2004

Tabel IV.3

Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	12.839	12.615	25.454
5-9	12.448	12.385	24.833
10-14	12.566	12.864	25.430
15-19	22.375	26.674	49.049
20-24	31.778	32.948	64.729
25-29	20.089	19.281	39.370
30-34	15.725	16.969	32.694
35-39	13.713	15.107	28.820
40-44	12.283	13.177	25.460
45-49	9.672	10.352	20.024
50-54	6.225	7.240	13.465
55-59	5.592	6.791	12.383
60-64	5.038	6.622	11.660
65-69	3.947	5.647	9.594
70-74	3.282	4.289	7.571
75+	2.964	4.507	7.471
Jumlah	190.536	207.468	398.004

Sumber data: BPS Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2004

H. Tenaga Kerja

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta pada tahun 2004 tercatat 9.475 orang, yang terdiri dari 88,38 persen pegawai pemerintah daerah dan 11,62 persen pegawai pemerintahan pusat. Berdasarkan golongan kepangkatan, di Kota Yogyakarta terdapat pegawai negeri sipil daerah golongan I 2,08 persen, golongan II 22,15 persen, golongan III 54,46 persen dan sisanya golongan IV 21,31 persen.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2004 sebanyak 18.964 orang yang terdiri dari 10.907 laki-laki dan 8.057 perempuan. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan sarjana yaitu

61,34 persen, kemudian diikuti yang berpendidikan SMU (26,72 persen), Diploma (9,86 persen) dan sisanya berpendidikan S2, SMTP dan SD.

I. Transmigrasi

Jumlah transmigran dari Kota Yogyakarta pada tahun 2004 tercatat 52 kepala keluarga yang terdiri dari 174 jiwa. Sebagian besar transmigran tersebut berasal dari Kecamatan Kotagede dan Tegalrejo, dan daerah penempatan terbanyak adalah Kalimantan Timur.

J. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Yogyakarta pada tahun 2004 mencapai 5.394 milyar rupiah atas dasar harga berlaku dan 1.667 milyar rupiah atas dasar harga konstan 1993. Sektor-sektor yang berperan besar terhadap pembentukan PDRB tersebut adalah sektor-sektor tersier yang meliputi: Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Angkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Sektor Jasa-jasa. Sumbangan sektor tersier tersebut terhadap PDRB lebih dari 75 persen.

Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mencapai 4,08 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2003 yang mencapai 4,05 persen. Pertumbuhan ekonomi ini terutama didorong oleh pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor angkutan dan komunikasi, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing 5,98 persen dan 4,81

persen. Kedua sektor tersebut merupakan sektor andalan dalam perekonomian Kota Yogyakarta.

K. Kekayaan Alam

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh kota Yogyakarta relatif terbatas baik tanah, air, maupun kandungan mineral yang tersimpan dalam perut bumi. Kendati demikian beranjak dari potensi alam yang terbatas, kota Yogyakarta mampu mengembangkan sektor-sektor ekonomi lainnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Kekayaan alam tersebut adalah:

1. Tanah

Jenis tanah yang terdapat di wilayah kota Yogyakarta adalah tanah alluvial, litosol, regosol, rendzina, glekosol, mediteran, dan latosol. Penguasaan tanah di kota Yogyakarta dikategorikan menjadi 2, yaitu: tanah yang dikuasai oleh masyarakat dan tanah yang dikuasai oleh negara. Tanah yang dikuasai oleh masyarakat adalah tanah yang diwarisi secara turun-temurun yang pada umumnya telah dimanfaatkan untuk lahan pemukiman, pertanian, dan perkebunan. Tanah yang dikuasai oleh negara adalah tanah untuk kawasan hutan dan tanah untuk kepentingan umum seperti tanah untuk saluran irigasi, jalan, lapangan olah raga, kuburan, dan lain-lain.

2. Air

Kondisi sumber daya air di kota Yogyakarta meliputi air hujan, air permukaan, dan air tanah. Air permukaan dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan untuk kepentingan lainnya. Air tanah

dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, perhotelan, dan industri lainnya yang berhubungan dengan kehidupan manusia.

3. Flora dan fauna

Jenis-jenis tumbuhan yang dimiliki kota Yogyakarta adalah padi, ubi, kayu, kacang kedelai, kelapa, kapuk, dan sebagainya. Jenis binatang meliputi: jenis hewan yang ditenakkan seperti sapi, kerbau, domba, ternak unggas, dan binatang satwa lainnya.

4. Bahan Tambang

Bahan tambang yang terdapat di kota Yogyakarta umumnya termasuk bahan galian golongan C, yaitu seperti: kerikil, pasir, dan sebagainya.

L. Ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor ekonomi di Kota Yogyakarta cenderung mengikuti skenario nasional yaitu menuju keseimbangan antara industri pertanian yang mendorong pertumbuhan sektor lain. Sektor industri semakin berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja baru. Pertumbuhan pesat sektor jasa seperti pariwisata dan transportasi menjanjikan peluang perkembangan sektor ekonomi.

Adapun sektor ekonomi tersebut adalah:

1. Pertanian

Pertanian merupakan sumber mata pencaharian yang utama bagi sebagian besar penduduk dan sekaligus sebagai penampung mayoritas angkatan kerja di Kota Yogyakarta. Sektor-sektor pertanian yang dilakukan meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Lahan

pertanian semakin lama semakin sempit karena dipergunakan untuk pemukiman penduduk.

2. Industri

Industri di Kota Yogyakarta tidak banyak, karena Yogyakarta bukan kota industri. Kota Yogyakarta memiliki beberapa perusahaan kecil, seperti: kerajinan di Kota Gede, BUMD, perusahaan susu SGM, dan industri kecil lainnya.

3. Pariwisata

Kota Yogyakarta juga sebagai kota tujuan wisata. Daerah wisata di Kota Yogyakarta meliputi: Kraton Yogyakarta, kawasan Malioboro, kebun binatang Gembira Loka, dan tujuan wisata lainnya.

4. Perdagangan

Pusat perdagangan di Kota Yogyakarta berpusat di pasar Beringharjo, dimana pasar ini merupakan pasar terbesar di Kota Yogyakarta, disamping pasar Beringharjo termasuk dalam kawasan Malioboro.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah realisasi APBD sudah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, dan juga untuk mengetahui tingkat kemandirian pemerintah Kota Yogyakarta dilihat dari realisasi pendapatan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan perhitungan APBD tahun 2001 sampai dengan 2004.

Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD. Yang dimaksud adalah selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dan realisasi pembiayaan dengan anggaran pembiayaan.

Laporan ringkasan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun anggaran 2001-2002, pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran masih menggunakan pendekatan *line item* atau pendekatan tradisional. Dalam pendekatan tradisional ini, anggaran disusun berdasarkan jenis penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja). Anggaran yang disusun dengan pendekatan tradisional ini bersifat berimbang dan dinamis. Dalam APBD tahun anggaran 2001 dan 2002, sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu merupakan salah satu komponen pos pendapatan.

Dengan adanya PP 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No.29/2002, maka bentuk dan susunan perhitungan APBD Kota Yogyakarta mulai tahun 2003 terdiri dari pos pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dalam susunan perhitungan APBD yang baru ini, pos pendapatan hanya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah. Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dimasukkan ke dalam pos pembiayaan. Pos belanja terdiri dari belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik.

B. Analisis Data

1. Mengevaluasi apakah realisasi pendapatan sudah sesuai dengan anggaran dilakukan untuk menilai prestasi yang dicapai pada laporan perhitungan APBD khususnya pada pos pendapatan. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan.

Langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut:

- 1) Memaparkan data mengenai anggaran dan realisasi pendapatan pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun anggaran 2001-2004.

Tabel V.1

Ringkasan Perhitungan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2001-2002 (dalam rupiah)

No	URAIAN	2001		2002	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN				
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	19.183.584.331,26	19.183.584.331,26	34.595.208.955,59	35.596.366.520,59
2.	Pendapatan Asli Daerah	33.125.458.598,74	40.352.592.890,43	49.685.313.410,17	56.377.459.398,89
3.	Dana Perimbangan	153.014.249.000,00	167.269.506.353,29	185.333.797.889,24	187.968.763.862,24
4.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	143.723.070,00	203.486.495,00	17.459.217.745,00	23.077.480.755,96
	JUMLAH PENDAPATAN	205.467.015.000,00	227.009.170.069,98	287.073.538.000,00	303.020.070.537,68

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta

Tabel V.2

Ringkasan Perhitungan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2003-2004 (dalam rupiah)

No	URAIAN	2003		2004	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN				
1.	Pendapatan Asli Daerah	56.822.010.000,00	68.621.564.311,07	70.412.081.000,00	79.911.419.100,82
2.	Dana Perimbangan	238.756.313.000,00	253.512.731.343,07	252.390.201.000,00	269.967.630.200,69
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	7.841.710.000,00	16.496.466.000,00	18.342.100.000,00	19.770.829.733,00
	JUMLAH PENDAPATAN	303.420.033.000,00	338.630.761.654,14	341.144.382.000,00	369.649.879.034,51

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta

- 2) Melakukan analisis varians dengan membandingkan antara realisasi anggaran pendapatan daerah dengan yang dianggarkan pada tahun anggaran 2001-2004 dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase (%).

Berikut adalah hasil analisis varians pada ringkasan perhitungan anggaran dan realisasi pendapatan pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun anggaran 2001-2004:

Tabel V.3
Analisis Varians Pendapatan Tahun Anggaran 2001(dalam rupiah)

URAIAN	JUMLAH		VARIANS (selisih) (Rp)	%
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	205.467.015.000,00	227.009.170.069,98	21.542.155.069,98	110,48
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	19.183.584.331,26	19.183.584.331,26	0	100
Pendapatan Asli Daerah	33.125.458.598,74	40.352.592.890,43	7.227.134.291,69	121,82
Dana Perimbangan	153.014.249.000,00	167.269.506.353,29	14.255.257.353,29	109,32
Lain-lain Pendapatan yang Sah	143.723.070,00	203.486.495,00	59.763.425,00	141,58

Sumber: data diolah

Tabel V.4
Analisis Varians Pendapatan Tahun Anggaran 2002 (dalam rupiah)

URAIAN	JUMLAH		VARIANS (selisih) (Rp)	%
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	287.073.538.000,00	303.020.070.537,68	15.946.532.537,68	105,55
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	34.595.208.955,59	35.596.366.520,59	1.001.157.570,00	102,89
Pendapatan Asli Daerah	49.685.313.410,17	56.377.459.398,89	6.692.145988,72	113,47
Dana Perimbangan	185.333.797.889,24	187.968.763.862,24	2.634.965.973,00	101,42
Lain-lain Pendapatan yang Sah	17.459.217.745,00	23.077.480.755,96	5.618.263.010,96	132,18

Sumber: data diolah

Tabel V.5

Analisis Varians Pendapatan Tahun Anggaran 2003 (dalam rupiah)

URAIAN	JUMLAH		VARIANS (selisih) (Rp)	%
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	303.420.033.000,00	338.630.761.654,14	35.210.728.654,14	111,60
Pendapatan Asli Daerah	56.822.010.000,00	68.621.564.311,07	11.799.554.311,07	120,76
Dana Perimbangan	238.756.313.000,00	253.512.731.343,07	14.756.418.343,07	106,18
Lain-lain Pendapatan yang Sah	7.841.710.000,00	16.496.466.000,00	8.654.756.000,00	210,37

Sumber: data diolah

Tabel V.6

Analisis Varians Pendapatan Tahun Anggaran 2004 (dalam rupiah)

URAIAN	JUMLAH		VARIANS (selisih) (Rp)	%
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	341.144.382.000,00	369.649.879.034,51	28.505.497.034,51	108,36
Pendapatan Asli Daerah	70.412.081.000,00	79.911.419.100,82	9.499.338.100,82	113,49
Dana Perimbangan	252.390.201.000,00	269.967.630.200,69	17.577.429.200,69	106,96
Lain-lain Pendapatan yang Sah	18.342.100.000,00	19.770.829.733,00	1.428.729.730,00	107,79

Sumber: data diolah

3) Kesimpulan

Dari hasil analisis varians dapat diketahui bahwa anggaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2001-2004 lebih kecil dari realisasinya, maka dapat dikatakan bahwa anggaran pendapatan tidak sesuai dengan realisasinya. Selisih dari anggaran dan realisasi pendapatan ini bersifat meningkat. Selisih yang bersifat meningkat ini dapat diartikan sebagai selisih yang menguntungkan.

Tabel V.7

Kesimpulan Analisis Varians Pendapatan Tahun Anggaran 2001

URAIAN	%	KESIMPULAN	SIFAT	KETERANGAN
PENDAPATAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	100	Sesuai	Tetap	
Pendapatan Asli Daerah	121,82	Tidak Sesuai	Meningkat	Menguntungkan
Dana Perimbangan	109,32	Tidak Sesuai	Meningkat	Menguntungkan
Lain-lain Pendapatan yang Sah	141,58	Tidak Sesuai	Meningkat	Menguntungkan
JUMLAH PENDAPATAN	110,48	Tidak Sesuai	Meningkat	Menguntungkan

Sumber: data diolah

Tabel V. 8

Kesimpulan Analisis Varians Pendapatan Tahun Anggaran 2002

URAIAN	%	KESIMPULAN	SIFAT	KETERANGAN
PENDAPATAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	102,89	Tidak Sesuai	Meningkat	Menguntungkan
Pendapatan Asli Daerah	121,82	Tidak Sesuai	Meningkat	Menguntungkan
Dana Perimbangan	101,42	Tidak Sesuai	Meningkat	Menguntungkan
Lain-lain Pendapatan yang Sah	132,18	Tidak Sesuai	Meningkat	Menguntungkan
JUMLAH PENDAPATAN	105,55	Tidak Sesuai	Meningkat	Menguntungkan

Sumber: data diolah

Tabel V. 9

Kesimpulan Analisis Varians Pendapatan Tahun Anggaran 2003

URAIAN	%	KESIMPULAN	SIFAT	KETERANGAN
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah	120,76	Tidak Sesuai	Meningkat	Menguntungkan
Dana Perimbangan	106,18	Tidak Sesuai	Meningkat	Menguntungkan
Lain-lain Pendapatan yang Sah	210,37	Tidak Sesuai	Meningkat	Menguntungkan
JUMLAH PENDAPATAN	111,60	Tidak Sesuai	Meningkat	Menguntungkan

Sumber: data diolah



Tabel V. 10
Kesimpulan Analisis Varians Pendapatan Tahun Anggaran 2004

URAIAN	%	KESIMPULAN	SIFAT	KETERANGAN
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah	113,49	Tidak Sesuai	Meningkat	Menguntungkan
Dana Perimbangan	106,96	Tidak Sesuai	Meningkat	Menguntungkan
Lain-lain Pendapatan yang Sah	107,79	Tidak Sesuai	Meningkat	Menguntungkan
JUMLAH PENDAPATAN	108,36	Tidak Sesuai	Meningkat	Menguntungkan

Sumber: data diolah

2. Mengevaluasi apakah realisasi belanja sudah sesuai dengan anggarannya dilakukan untuk menilai prestasi yang dicapai pada laporan perhitungan APBD khususnya pada pos belanja. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara realisasi pendapatan dengan anggaran belanja.

Langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut:

- 1) Memaparkan data mengenai anggaran dan realisasi belanja pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun anggaran 2001-2004.

Tabel V.11

Ringkasan Perhitungan Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2001-2002 (dalam rupiah)

No	URAIAN	2001		2002	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	BELANJA				
1.	Belanja Rutin	186.336.774.000,00	175.960.709.677,39	249.283.379.386,00	190.827.224.760,01
2.	Belanja Pembangunan	19.130.241.000,00	16.453.251.437,00	37.790.158.614,00	33.998.267.081,00
	JUMLAH BELANJA	205.467.015.000,00	192.413.961.114,39	287.073.538.000,00	224.825.491.841,01

*Sumber: BPKD Kota Yogyakarta***Tabel V.12**

Ringkasan Perhitungan Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2003-2004

No	URAIAN	2003		2004	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	BELANJA				
1.	Belanja Aparatur Daerah	62.807.668.122,00	52.950.512.131,94	65.747.492.220,00	58.351.605.850,29
2.	Belanja Pelayanan Publik	284.849.295.261,00	252.400.520.295,50	349.459.699.097,00	311.988.969.919,75
	JUMLAH BELANJA	347.656.963.383,00	305.351.032.427,44	415.207.191.317,00	370.340.575.770,04
	Surplus/(Defisit)	(44.236.930.383,00)	33.279.729.226,70	(74.062.809.317,00)	(690.696.735,53)
	PENDAPATAN-BELANJA				

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta

- 2) Melakukan analisis varians dengan membandingkan antara realisasi anggaran belanja daerah dengan yang dianggarkan pada tahun anggaran 2001-2004 dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase (%). Karena pada tahun anggaran 2003 dan 2004 memuat perhitungan surplus/(defisit) (pendapatan-belanja), maka penghitungan analisis variansnya digabungkan dengan pos belanja.

Berikut adalah hasil analisis varians pada ringkasan perhitungan anggaran dan realisasi belanja pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun anggaran 2001-2004:

Tabel V.13

Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2001 (dalam rupiah)

URAIAN	JUMLAH		VARIANS (selisih) (Rp)	%
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5
BELANJA	205.467.015.000,00	192.413.961.114,39	13.053.053.885,61	93,65
Belanja Rutin	186.336.774.000,00	175.960.709.677,39	10.376.064.322,61	94,44
Belanja Pembangunan	19.130.241.000,00	16.453.251.437,00	2.676.989.570,00	86,01

Sumber: data diolah

Tabel V.14

Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2002 (dalam rupiah)

URAIAN	JUMLAH		VARIANS (selisih) (Rp)	%
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5
BELANJA	287.073.538.000,00	224.825.491.841,01	62.248.046.158,99	78,32
Belanja Rutin	249.283.379.386,00	190.827.224.760,01	58.456.154.625,99	76,55
Belanja Pembangunan	37.790.158.614,00	33.998.267.081,00	3.791.891.533,00	89,97

Sumber: data diolah

Tabel V.15

Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2003 (dalam rupiah)

URAIAN	JUMLAH		VARIANS (Selisih) (Rp)	%
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
BELANJA	347.656.963.383,00	305.351.032.427,44	42.305.930.955,56	87,83
Belanja Aparatur Daerah	62.807.668.122,00	52.950.512.131,94	9.857.155.990,06	84,31
Belanja Pelayanan Publik	284.849.295.261,00	252.400.520.295,50	32.448.774.965,50	88,61
SURPLUS/DEFISIT (PENDAPATAN- BELANJA)	(44.236.930.383,00)	33.279.729.226,70		

*Sumber: data diolah***Tabel V.16**

Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2004 (dalam rupiah)

URAIAN	JUMLAH		VARIANS (Selisih) (Rp)	%
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
BELANJA	415.207.191.317,00	370.340.575.770,04	44.866.615.546,96	89,19
Belanja Aparatur Daerah	65.747.492.220,00	58.351.605.850,29	7.395.886.369,71	88,75
Belanja Pelayanan Publik	349.459.669.097,00	311.988.969.919,75	37.470.729.177,25	89,19
SURPLUS/DEFISIT (PENDAPATAN- BELANJA)	(74.062.809.317,00)	(690.696.735,53)		

Sumber: data diolah

3) Kesimpulan

Dari hasil analisis varians dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah untuk tahun anggaran 2001-2004 lebih rendah dari pada anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa anggaran belanja tidak sesuai dengan realisasinya. Selisih dari anggaran dan realisasi belanja ini bersifat menguntungkan.

Tabel V. 17

Kesimpulan Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2001

URAIAN	%	KESIMPULAN	SIFAT
BELANJA			
Belanja Rutin	94,44	Tidak Sesuai	Menguntungkan
Belanja Pembangunan	86,01	Tidak Sesuai	Menguntungkan
JUMLAH BELANJA	93,65	Tidak Sesuai	Menguntungkan

Sumber: data diolah

Tabel V. 18

Kesimpulan Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2002

URAIAN	%	KESIMPULAN	SIFAT
BELANJA			
Belanja Rutin	76,55	Tidak Sesuai	Menguntungkan
Belanja Pembangunan	89,97	Tidak Sesuai	Menguntungkan
JUMLAH BELANJA	78,32	Tidak Sesuai	Menguntungkan

Sumber: data diolah

Tabel V. 19

Kesimpulan Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2003

URAIAN	%	KESIMPULAN	SIFAT
BELANJA			
Belanja Aparatur Daerah	84,31	Tidak Sesuai	Menguntungkan
Belanja Pelayanan Publik	88,61	Tidak Sesuai	Menguntungkan
JUMLAH BELANJA	87,83	Tidak Sesuai	Menguntungkan

Sumber: data diolah

Tabel V. 20

Kesimpulan Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2004

URAIAN	%	KESIMPULAN	SIFAT
BELANJA			
Belanja Aparatur Daerah	88,75	Tidak Sesuai	Menguntungkan
Belanja Pelayanan Publik	89,28	Tidak Sesuai	Menguntungkan
JUMLAH BELANJA	89,19	Tidak Sesuai	Menguntungkan

Sumber: data diolah

3. Menghitung tingkat kemandirian pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2004 dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah

Tabel V. 17

Kesimpulan Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2001

URAIAN	%	KESIMPULAN	SIFAT
BELANJA			
Belanja Rutin	94,44	Tidak Sesuai	Menguntungkan
Belanja Pembangunan	86,01	Tidak Sesuai	Menguntungkan
JUMLAH BELANJA	93,65	Tidak Sesuai	Menguntungkan

Sumber: data diolah

Tabel V. 18

Kesimpulan Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2002

URAIAN	%	KESIMPULAN	SIFAT
BELANJA			
Belanja Rutin	76,55	Tidak Sesuai	Menguntungkan
Belanja Pembangunan	89,97	Tidak Sesuai	Menguntungkan
JUMLAH BELANJA	78,32	Tidak Sesuai	Menguntungkan

Sumber: data diolah

Tabel V. 19

Kesimpulan Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2003

URAIAN	%	KESIMPULAN	SIFAT
BELANJA			
Belanja Aparatur Daerah	84,31	Tidak Sesuai	Menguntungkan
Belanja Pelayanan Publik	88,61	Tidak Sesuai	Menguntungkan
JUMLAH BELANJA	87,83	Tidak Sesuai	Menguntungkan

Sumber: data diolah

Tabel V. 20

Kesimpulan Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2004

URAIAN	%	KESIMPULAN	SIFAT
BELANJA			
Belanja Aparatur Daerah	88,75	Tidak Sesuai	Menguntungkan
Belanja Pelayanan Publik	89,28	Tidak Sesuai	Menguntungkan
JUMLAH BELANJA	89,19	Tidak Sesuai	Menguntungkan

Sumber: data diolah

3. Menghitung tingkat kemandirian pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2004 dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah

dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan anatara realisasi PAD dengan realisasi bantuan pemerintah pusat/propinsi dan pinjaman.

Langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut:

- 1) Menjumlahkan komponen-komponen realisasi pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahun.

Tabel V.21
Perkembangan Realisasi PAD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2001-2004 (dalam rupiah)

Uraian PAD	Tahun Anggaran			
	2001	2002	2003	2004
Pajak Daerah	22.0886.374.632,00	30.517.591.845,50	33.526.514.267,53	40.581.980.256,00
Retribusi Daerah	1.773.895.343,16	14.193.457.159,11	16.093.220.398,50	18.995.046.383,00
Bagian Laba Usaha Daerah	2.249.570.025,31	2.509.234.852,65	4.081.649.388,86	5.285.786.650,47
Lain-lain PAD yang Sah	3.442.752.889,46	9.157.175.541,63	14.920.180.256,18	15.048.605.811,35
Total PAD	40.352.592.890,43	56.377.459.398,89	68.621.564.311,07	79.911.419.100,82

Sumber Data: BPKD Pemerintah Kota Yogyakarta

- 2) Menjumlahkan komponen-komponen realisasi bantuan pemerintah/propinsi dan pinjaman setiap tahun.

Tabel V.22

Perkembangan Realisasi Total Bantuan Pemerintah/Propinsi dan Pinjaman Pemerintah Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2001-2004 (dalam rupiah)

Uraian Bantuan Pemerintah/Propinsi dan Pinjaman	Tahun Anggaran			
	2001	2002	2003	2004
Dana Perimbangan	167.269.506.353,29	187.968.763.862,24	253.512.731.343,07	269.967.630.200,69
Lain-lain Pendapatan yang Sah	203.486.495,00	23.077.480.755,96	16.496.466.000,00	19.770.829.733,00
Total Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman	167.472.992.848,29	211.046.244.618,20	270.009.197.343,07	289.738.459.933,69

Sumber Data: BPKD Pemerintah Kota Yogyakarta

- 3) Membagi total pendapatan asli daerah dengan total bantuan pemerintah pusat/propinsi dengan pinjaman.

Tabel V.23

Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2001-2004

Tahun	PAD (Rp)	Total Bantuan Pemerintah/Propinsi dan Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2001	40.352.592.890,43	167.269.506.353,29	24,09%
2001	56.377.459.398,89	211.046.244.618,20	26,71%
2003	68.621.564.311,07	270.009.197.343,07	25,41%
2004	79.911.419.100,82	289.738.459.933,69	27,58%
Rata-rata			25,95%

Sumber data: data diolah

4) Kesimpulan

Dari hasil rasio kemandirian dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian pemerintah Kota Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2001-2004 rata-rata sebesar 25,95% per tahun. Dengan rata-rata rasio kemandirian sebesar 25,95% per tahun berarti tingkat kemandirian pemerintah Kota Yogyakarta masih tergolong rendah. Peran atau campur tangan pemerintah pusat dalam urusan otonomi daerah sudah mulai berkurang. Pola hubungan seperti ini disebut dengan pola *konsultatif*.

C. Pembahasan

1. Dari tabel V.3 sampai V.6 dapat diketahui bahwa anggaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2001-2004 lebih kecil dari realisasinya, berarti anggaran pendapatan tidak sesuai dengan realisasinya. Selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan ini bersifat meningkat. Selisih yang bersifat meningkat ini dapat diartikan sebagai selisih yang menguntungkan. Varians (selisih) antara anggaran dan realisasi pendapatan berkisar antara Rp15.946.532.537,68 sampai dengan Rp35.210.728.654,14.

- a. Pada tahun 2001, anggaran pendapatan lebih kecil dari realisasinya. Berarti anggaran pendapatan tidak sesuai dengan realisasinya. Selisih (varians) antara anggaran dan realisasi pendapatan ini bersifat meningkat atau dapat dikatakan menguntungkan. Selisih (varians) yang menguntungkan ini terjadi karena kinerja bagian pendapatan yang bagus. Hal ini dapat dilihat dari adanya evaluasi bersama yang rutin dilakukan di triwulan ke II oleh kepala bagian pendapatan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan realisasi pendapatan, sehingga di triwulan berikutnya realisasi pendapatan diharapkan akan meningkat atau minimal sama dengan yang dianggarkan. Dari tabel V.3 dapat dilihat bahwa pada tahun ini pendapatan yang dianggarkan adalah sebesar Rp205.467.015.000,00 dan pada kenyataannya pendapatan dapat terealisasi sebesar Rp227.009.170.069,98, sehingga terdapat varians (selisih lebih) yang menguntungkan pada bagian pendapatan sebesar Rp21.542.155.069,98. Realisasi pendapatan meningkat sebesar 10,48% (110,48%-100%) dari anggaran yang telah ditetapkan.

Jika dilihat dari peningkatan realisasinya, sebagian besar peningkatan realisasi pendapatan dipengaruhi oleh peningkatan pos lain-lain pendapatan yang sah dan pos PAD. Varians pos lain-lain pendapatan yang sah adalah sebesar Rp59.763.425,00 atau meningkat sebesar 41,58% dari anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan pos PAD meningkat sebesar 21,82% atau sebesar Rp7.227.134.291,69 dari anggaran yang telah ditetapkan. Namun jika dilihat dari kontribusinya terhadap total pendapatan, pos dana perimbangan memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan komponen

pendapatan lainnya, yaitu sebesar Rp167.269.506.353,29. Tetapi jika dilihat dari realisasinya, dana perimbangan hanya meningkat sebesar 9,32% atau sebesar Rp14.255.257.353,29 dari anggaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, pada pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu didapatkan varians sebesar 0 (nol). Karena anggaran pos lain-lain pendapatan yang sah sama dengan realisasinya, maka sifat dari pos lain-lain pendapatan yang sah untuk tahun ini adalah tetap.

- b. Pada tahun 2002, anggaran pendapatan lebih kecil dari realisasinya. Berarti anggaran pendapatan tidak sesuai dengan realisasinya. Selisih (varians) antara anggaran dan realisasi pendapatan ini bersifat meningkat atau dapat dikatakan menguntungkan. Selisih (varians) yang menguntungkan pada tahun ini terjadi karena kinerja bagian pendapatan yang bagus. Selain dapat dilihat dari evaluasi bersama yang rutin yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan realisasi pendapatan, kepala bagian pendapatan juga memberikan motivasi dan semangat kepada anggotanya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu memperoleh pendapatan dalam jumlah yang maksimal (khususnya PAD). Dari tabel V.4 dapat dilihat bahwa pada tahun ini pendapatan yang dianggarkan adalah sebesar Rp287.073.538.000,00 dan pada kenyataannya pendapatan dapat terealisasi sebesar Rp303.020.070.537,68, sehingga terdapat varians (selisih lebih) yang menguntungkan pada bagian pendapatan sebesar Rp15.946.532.537,68. Realisasi pendapatan meningkat sebesar 5,55% (105,55%-100%) dari anggaran yang telah ditetapkan.

Jika dilihat dari peningkatan realisasinya, dari masing-masing komponen pendapatan yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah pos lain-lain pendapatan yang sah dan pos PAD. Varians pos lain-lain pendapatan yang sah adalah sebesar Rp5.618.263.010,96 atau meningkat sebesar 32,18%. Sedangkan pos PAD meningkat sebesar 13,47% atau sebesar Rp6.692.145.988,72. Namun jika dilihat dari kontribusinya terhadap total pendapatan, pos dana perimbangan memberikan kontribusi yang paling besar terhadap total pendapatan yaitu sebesar Rp187.968.763.862,24. Tetapi jika dilihat dari realisasinya, dana perimbangan hanya meningkat sebesar Rp2.634.965.937,00 atau sebesar 1,42% dari yang dianggarkan. Pada tahun ini, varians realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sebesar Rp1.001.157.570,00 atau meningkat sebesar 2,89% dari anggaran yang telah ditetapkan.

- c. Pada tahun 2003, anggaran pendapatan lebih kecil dari realisasinya. Berarti anggaran pendapatan tidak sesuai dengan realisasinya. Selisih (varians) antara anggaran dan realisasi pendapatan ini bersifat meningkat atau dapat dikatakan menguntungkan. Pada tahun ini selisih (varians) yang menguntungkan terjadi karena kinerja bagian pendapatan yang bagus. Hal ini dapat dilihat dari evaluasi bersama yang rutin dilakukan di triwulan ke II untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan realisasi pendapatan (terutama bila sampai di triwulan ke II realisasi pendapatan belum mencapai 50%). Dari tabel V.5 dapat dilihat bahwa pada tahun ini pendapatan yang dianggarkan adalah sebesar Rp303.420.033.000,00 dan pada kenyataannya pendapatan dapat

teralisasi sebesar Rp338.630.761.654,14, sehingga terdapat varians (selisih lebih) yang menguntungkan pada bagian pendapatan sebesar Rp35.210.728.654,14 atau dapat dikatakan bahwa realisasi pendapatan meningkat sebesar 11,60% (111,60%-100%) dari anggaran yang telah ditetapkan. Peningkatan pendapatan pada tahun ini lebih besar dibandingkan dibandingkan peningkatan pendapatan pada tahun anggaran lainnya,

Jika dilihat dari peningkatan realisasinya, dari masing-masing komponen pendapatan yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah pos lain-lain pendapatan yang sah dan pos PAD. Pada pos lain-lain pendapatan yang sah terdapat varians sebesar Rp8.654.756.000,00 atau meningkat sebesar 110,37% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pada pos PAD terdapat varians sebesar Rp11.799.554.311,07 atau meningkat sebesar 20,76% dari anggaran yang telah ditetapkan. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini pos dana perimbangan memberikan kontribusi yang paling besar pada total pendapatan jika dibandingkan komponen pendapatan lainnya, yaitu sebesar Rp253.512.731.343,07. Tetapi jika dilihat dari realisasinya, pos dana perimbangan hanya meningkat sebesar 6,18% atau sebesar Rp14.756.418.343,07 dari anggaran yang telah ditetapkan.

- d. Pada tahun 2004, anggaran pendapatan lebih kecil dari realisasinya. Berarti anggaran pendapatan tidak sesuai dengan realisasinya. Selisih (variens) antara anggaran dan realisasi pendapatan ini bersifat meningkat atau dapat dikatakan menguntungkan. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, adanya evaluasi bersama yang rutin dilakukan di triwulan ke II dan motivasi untuk bekerja

lebih baik dapat meningkatkan semangat dan kinerja bagian pendapatan, sehingga realisasi pendapatan menjadi maksimal dan selisih antara anggaran dan realisasinya menjadi menguntungkan. Dari tabel V.6 dapat dilihat bahwa pada tahun ini pendapatan yang dianggarkan adalah sebesar Rp341.144.382.000,00 dan pada kenyataannya pendapatan dapat terealisasi sebesar Rp369.649.879.034,51, sehingga terdapat varians (selisih lebih) yang menguntungkan pada bagian pendapatan sebesar Rp28.505.497.034,51 atau dapat dikatakan bahwa realisasi pendapatan meningkat sebesar 8,36% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Jika dilihat dari peningkatan realisasinya, pada tahun ini pos PAD mengalami peningkatan yang paling besar dibandingkan komponen pendapatan lainnya, yaitu sebesar 13,49% atau meningkat sebesar Rp9.499.338.100,82 dari anggaran yang telah ditetapkan. Pada pos lain-lain pendapatan yang sah terdapat varians sebesar Rp1.428.729.730,00 atau meningkat sebesar 7,79%. Sementara itu pada pos dana perimbangan terdapat varians sebesar Rp17.577.429.200,69 atau meningkat sebesar 6,69% dari anggaran yang telah ditetapkan. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jika dilihat dari kontribusinya terhadap total pendapatan, dana perimbangan memberikan kontribusi yang paling besar jika dibandingkan komponen pendapatan lainnya, yaitu sebesar Rp269.967.630.200,69.

2. Dari tabel V.13 sampai V.16 dapat diketahui bahwa anggaran belanja daerah untuk tahun anggaran 2001 sampai dengan 2004 lebih besar dari realisasinya,

berarti anggaran belanja tidak sesuai dengan realisasinya. Selisih antara anggaran dan realisasi belanja ini bersifat menguntungkan. Varians (selisih) antara anggaran dan realisasi belanja berkisar antara Rp13.053.053.885,61 sampai dengan Rp62.248.046.158,99.

- a. Pada tahun 2001, realisasi belanja lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan. Berarti anggaran belanja tidak sesuai dengan realisasinya. Selisih (varians) antara anggaran dan realisasi belanja bersifat menguntungkan. Varians (selisih) yang menguntungkan ini terjadi karena anggaran yang tersedia tidak semuanya digunakan sebab biaya yang digunakan untuk merealisasi belanja (rutin dan pembangunan) dirasa sudah cukup dan sisa anggaran dapat digunakan untuk kebutuhan belanja tahun berikutnya. Dari tabel V.13 dapat dilihat bahwa pada tahun ini terdapat varians (selisih kurang) pada bagian belanja sebesar Rp13.053.053.885,61 atau menguntungkan sebesar 6,35% (100%-93,65%). Pada pos belanja rutin terdapat varians sebesar Rp10.376.064.322,61 atau dapat dikatakan bahwa realisasi belanja rutin menguntungkan sebesar 5,56%. Dan pada pos belanja pembangunan terdapat varians sebesar Rp2.676.989.570,00 atau dapat dikatakan bahwa realisasi belanja pembangunan menguntungkan sebesar 13,99%.
- b. Pada tahun 2002, realisasi belanja lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan. Berarti anggaran belanja tidak sesuai dengan realisasinya. Selisih (varians) antara anggaran dan realisasi belanja bersifat menguntungkan. Varians (selisih) yang menguntungkan ini terjadi karena anggaran yang tersedia tidak semuanya digunakan sebab realisasi belanja (rutin dan

pembangunan) dirasa cukup dan sisa anggaran dapat digunakan untuk kebutuhan belanja tahun berikutnya, selain itu ada juga alokasi belanja yang telah direncanakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga tetapi pada kenyataannya kebutuhan yang tidak diduga tersebut tidak semuanya terjadi, sehingga belanja yang terealisasi hanya sedikit (contoh: belanja pengeluaran tidak tersangka). Dari tabel V.14 dapat dilihat bahwa pada tahun ini terdapat varians (selisih kurang) pada bagian belanja sebesar Rp62.248.046.158,99 atau menguntungkan sebesar 21,68% (100%-78,32%). Varians belanja pada tahun ini merupakan selisih yang paling besar atau paling menguntungkan dibandingkan tahun-tahun lainnya. Pada pos belanja rutin terdapat varians sebesar Rp58.456.154.625,99 atau dapat dikatakan bahwa realisasi belanja rutin menguntungkan sebesar 23,45%. Dan pada pos belanja pembangunan terdapat varians sebesar Rp3.791.891.533,00 atau dapat dikatakan bahwa realisasi belanja pembangunan menguntungkan sebesar 10,03%.

- c. Pada tahun 2003, realisasi belanja lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan. Berarti anggaran belanja tidak sesuai dengan realisasinya. Selisih (variens) antara anggaran dan realisasi belanja bersifat menguntungkan. Sama seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini varians yang menguntungkan terjadi karena realisasi belanja (aparatur daerah dan pelayanan publik) dirasa sudah cukup sehingga anggaran belanja tidak semuanya digunakan, tetapi digunakan untuk kebutuhan belanja tahun berikutnya. Dari tabel V.15 dapat dilihat bahwa pada tahun ini terdapat varians (selisih kurang) pada bagian belanja sebesar Rp42.305.930.955,56 atau menguntungkan sebesar 12,17% (100%-

87,83%). Pada pos belanja apartur daerah terdapat varians sebesar Rp9.857.155.990,06 atau dapat dikatakan bahwa realisasi belanja aparatur daerah menguntungkan sebesar 15,69%. Dan pada pos belanja pelayanan publik terdapat varians sebesar Rp32.448.774.965,50 atau dapat dikatakan bahwa realisasi belanja pelayanan publik menguntungkan sebesar 11,39%.

Pada pembahasan anggaran belanja tahun 2003 ini akan dibahas juga mengenai pos surplus/(defisit), karena pada akhir perhitungan pendapatan terdapat pos surplus/(defisit) yang nantinya akan dimanfaatkan pada bagian pembiayaan bila mengalami surplus atau akan ditutup bila mengalami defisit. Dari APBD tahun anggaran 2003 dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan yaitu sebesar Rp303.420.033.000,00 lebih kecil dari anggaran belanja yang mencapai Rp347.656.963.383,00, sehingga pada pos surplus/(defisit) bagian anggaran mengalami defisit sebesar Rp(44.236.930.383,00). Tetapi pada kenyataannya realisasi pendapatan lebih besar daripada realisasi belanja. Realisasi pendapatan sebesar Rp338.630.761.654,14 sedangkan realisasi belanja hanya sebesar Rp303.351.032.427,44, sehingga pos surplus/(defisit) bagian realisasi mengalami surplus sebesar Rp33.279.729.226,70. Surplus ini selanjutnya akan dimanfaatkan pada bagian pembiayaan.

- d. Pada tahun 2004, realisasi belanja lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan. Berarti anggaran belanja tidak sesuai dengan realisasinya. Selisih (variens) antara anggaran dan realisasi belanja bersifat menguntungkan. Pada tahun ini varians yang menguntungkan terjadi karena realisasi belanja (aparatur daerah dan pelayanan publik) dirasa sudah cukup sehingga anggaran

belanja tidak semuanya digunakan, tetapi digunakan untuk kebutuhan belanja tahun berikutnya. Dari tabel V.16 dapat dilihat bahwa pada tahun ini terdapat varians (selisih kurang) pada bagian belanja sebesar Rp44.866.615.546,96 atau menguntungkan sebesar 10,81% (100%-89,19%). Pada pos belanja aparatur daerah terdapat varians sebesar Rp7.395.886.369,71 atau dapat dikatakan bahwa realisasi belanja aparatur daerah menguntungkan sebesar 11,25%. Dan pada pos belanja pelayanan publik terdapat varians sebesar Rp37.470.729.177,25 atau dapat dikatakan bahwa realisasi pelayanan publik menguntungkan sebesar 10,72%.

Sama seperti tahun 2003, perhitungan APBD tahun anggaran 2004 juga memuat pos surplus/(defisit) pada akhir perhitungan belanja. Maka dalam pembahasan bagian belanja ini akan dibahas sedikit mengenai selisih antara pendapatan dan belanja yang terdapat pada pos surplus/(defisit). Dari APBD tahun anggaran 2004 dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan yaitu sebesar Rp341.144.382.000,00 lebih kecil dari anggaran belanja yang mencapai Rp415.207.191.317,00, sehingga pada pos surplus/(defisit) bagian anggaran mengalami defisit sebesar Rp(74.062.809.317,00). Meskipun realisasi pos surplus/(defisit) masih mengalami defisit, namun defisit yang dialami jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pos surplus/(defisit) bagian anggaran yaitu sebesar Rp(690.696.735,53). Hal ini disebabkan karena realisasi pendapatan yaitu sebesar Rp369.649.879.034,51 lebih besar daripada anggaran pendapatan yang telah ditetapkan, dan realisasi belanja yaitu sebesar Rp370.340.575.770,04 lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan,

sehingga pada realisasinya pos surplus/(defisit) hanya mengalami defisit sebesar Rp(690.696.735,53). Defisit ini selanjutnya akan ditutup pada bagian pembiayaan.

3. Dari tabel V.23 dapat diketahui bahwa rata-rata rasio kemandirian pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun anggaran 2001-2004 yang tercermin dalam realisasi PAD masih rendah. Peran atau campur tangan pemerintah pusat dalam urusan otonomi daerah sudah mulai berkurang. Pola hubungan ini disebut dengan pola *konsultatif*. Meskipun rata-ratarasio kemandirian pemerintah Kota Yogyakarta masih rendah tetapi besarnya PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dari tabel V.23 dapat diketahui bahwa selama tahun anggaran 2001 sampai dengan 2004, besarnya rasio kemandirian berkisar antara 24,09% sampai dengan 27,58%.

a. Pada tahun 2001, rasio kemandirian pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 24,09%. PAD yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membayar sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat hanya mampu memberikan kontribusi sebesar Rp40.352.592.890,43 terhadap total pendapatan. Sementara itu, bantuan pemerintah pusat/propinsi dan pinjaman yang merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap total pendapatan, yaitu sebesar Rp167.472.992.848,29. Pada tahun ini tingkat kemandirian pemerintah Kota Yogyakarta masih rendah sekali, yang berarti tidak mampu untuk melakukan otonomi daerah karena daerah

tersebut masih sangat tergantung terhadap bantuan pemerintah pusat/propinsi dan pinjaman. Pola hubungan ini disebut dengan pola *instruktif*. Total pendapatan pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun ini sebagian besar berasal dari komponen pos dana perimbangan, yaitu sebesar Rp167.269.506.353,29.

- b. Pada tahun 2002, rasio kemandirian pemerintah Kota Yogyakarta meningkat sebesar 2,62% menjadi 26,71%. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen pos PAD mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi Rp14.193.457.159,11. Dengan adanya peningkatan tersebut PAD mampu memberikan kontribusi sebesar Rp56.377.459.398,89 terhadap total pendapatan. Sementara itu, bantuan pemerintah pusat/propinsi dan pinjaman yang merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap total pendapatan, yaitu sebesar Rp211.046.244.618,20. Dengan adanya peningkatan rasio kemandirian sebesar 2,62% meningkat pula tingkat kemandirian pemerintah. Tetapi tingkat kemandirian pemerintah Kota Yogyakarta masih tergolong rendah karena ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat/propinsi masih tinggi, tetapi sedikit demi sedikit peran atau campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang. Pola hubungan ini disebut dengan pola *konsultatif*.
- c. Pada tahun 2003, rasio kemandirian pemerintah Kota Yogyakarta menurun sebesar 1,3% menjadi 25,41%. Hal ini disebabkan karena dana perimbangan yang merupakan bantuan pemerintah/propinsi meningkat menjadi

Rp253.512.731.343,07. Selain itu, realisasi anggaran lain-lain pendapatan yang sah juga meningkat sebesar Rp8.654.756.000,00 dari yang dianggarkan menjadi Rp16.496.466.000,00. Dengan adanya peningkatan tersebut maka meningkat pula kontribusi bantuan pemerintah pusat/propinsi terhadap total pendapatan, yaitu sebesar Rp270.009.197.343,07. Sementara itu PAD hanya mampu memberikan kontribusi sebesar Rp68.621.564.311,07 terhadap total pendapatan. Meskipun pada tahun ini realisasi PAD juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun peningkatan yang terjadi hanya sebesar Rp12.244.104.912,18 dari tahun sebelumnya. Berbeda dengan peningkatan total bantuan pemerintah/propinsi dan pinjaman, pada tahun ini total bantuan pemerintah/propinsi dan pinjaman meningkat sebesar Rp58.962.952.724,87 dari tahun sebelumnya. Sehingga meskipun PAD meningkat, tingkat kemandirian pemerintah Kota Yogyakarta masih tetap tergolong rendah. Peran atau campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang. Pola hubungan ini disebut dengan pola *konsultatif*.

- d. Pada tahun 2004, rasio kemandirian pemerintah Kota Yogyakarta meningkat sebesar 2,17% menjadi 27,58%. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini realisasi pajak daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu sebesar Rp7.055.465.988,47 dari tahun sebelumnya. Selain itu, meskipun salah satu bagian bantuan pemerintah pusat/propinsi yaitu lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan sebesar Rp3.274.363.733,00 tetapi bantuan dana kontinjensi/penyeimbang dari pemerintah yang merupakan bagian dari pos lain-lain pendapatan yang sah mengalami

penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar Rp10.024.636.267,00 dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini, bantuan pemerintah/propinsi memberikan kontribusi sebesar Rp289.738.459.933,69 terhadap total pendapatan. Sedangkan PAD hanya memberikan kontribusi sebesar Rp79.911.419.100,82 terhadap total pendapatan. Meskipun rasio kemandirian mengalami peningkatan, tetapi tingkat kemandirian pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun ini masih tetap tergolong rendah. Peran atau campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang. Pola hubungan ini disebut dengan pola *konsultatif*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan daerah pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 2004 lebih kecil dari realisasinya, berarti dapat dikatakan realisasi pendapatan daerah tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan selisih antara anggaran dan realisasinya ini bersifat meningkat, selisih yang meningkat ini dapat diartikan sebagai selisih yang menguntungkan.
2. Anggaran belanja daerah pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 2001 sampai dengan 2004 lebih besar dari realisasinya, berarti dapat dikatakan realisasi belanja daerah tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan selisih antara anggaran dan realisasinya ini bersifat menguntungkan.
3. Tingkat kemandirian pemerintah Kota Yogyakarta dari rasio PAD terhadap bantuan pemerintah pusat/propinsi dari tahun anggaran 2001 sampai dengan 2004 rata-rata sebesar 25,95% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah Kota Yogyakarta masih tergolong rendah. Bantuan pemerintah pusat/propinsi selalu meningkat dan jumlahnya jauh lebih besar dibanding PAD. Dalam kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa campur

tangan pemerintah pusat dalam urusan keuangan daerah masih dominan, namun sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Penelitian ini mempunyai ruang lingkup terbatas, dimana kesimpulan hanya berdasarkan data yang diperoleh dan hanya berlaku pada pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apakah anggaran pendapatan sudah sesuai dengan realisasinya, penulis hanya menggunakan teknik analisis varians. Dalam mengukur tingkat kemandirian pemerintah Kota Yogyakarta, peneliti hanya menggunakan rasio kemandirian, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan pemerintah pusat/propinsi dan pinjaman.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat atau pinjaman semakin menurun, sehingga di tahun-tahun mendatang pemerintah Kota Yogyakarta bisa lebih mandiri dalam membangun dan mengembangkan daerahnya. Cara yang dapat dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pajak

daerah (misalnya dengan meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak) dan meningkatkan retribusi daerah (misalnya dari retribusi parkir dan retribusi pasar). Selain itu, PAD dapat ditingkatkan dengan cara melakukan pemungutan (baik pajak maupun retribusi) dengan lebih giat dan teliti.

2. Peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti beberapa tahun anggaran dengan bentuk dan susunan perhitungan APBD yang sama agar tidak mengalami kesulitan dalam penghitungannya karena masalah perbedaan data. Dalam melakukan evaluasi APBD, peneliti selanjutnya dapat menambah alat analisisnya, misalnya: untuk mengevaluasi pendapatan, selain menggunakan teknik analisis varians dapat juga ditambah dengan melihat tabungan daerahnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Sri dan Lita Yulita. (2003). Implementasi Otonomi Daerah dan Pengukuran Kinerja Pemerintah. *Buletin Ekonomi*, Vol.1 No.1. Edisi April : 17-26.
- Badan Pusat Statistik. (2004). *Kota Yogyakarta dalam Angka*. Yogyakarta.
- Bryant, Coralie dan Louise G.White. (1989). *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Terjemahan oleh Rusyanto L. Simatupang. Jakarta: LP3ES.
- Downes, Jhon dan Jordon Elliot Goodman. (1991). *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. (Edisi Pertama). Jakarta: Salemba Empat.
- . (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. (Edisi Revisi). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat*. (Edisi Pertama). Jakarta: Cides.
- Mamesah, D.J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marbun, B.N. (2005). *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- . (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Media, Sri. (2005). Analisis Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Kinerja Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat Tahun 2004). *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. (Tidak Dipublikasikan)
- Magister Ekonomika Pembangunan (MEP-UGM). (2003). *Bahan Kuliah Seminar Keuangan Daerah*. Yogyakarta: MEP-UGM

- PAU SE-UGM. (2003). *Penyusunan Anggaran (RAPBD) Berdasarkan Pendekatan Kinerja*. Yogyakarta: PAU SE-UGM. (Tidak Dipublikasikan).
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Otonomi Daerah 2004*. Bandung: Citra Umbara.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Triyono. (2002). Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.1 No.2. Edisi September : 139-152.

LAMPIRAN

Lampiran 1

**RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2001**

NO	PENDAPATAN	JUMLAH		NO	BELANJA	JUMLAH	
		ANGGARAN	REALISASI			ANGGARAN	REALISASI
1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	19.183.584.331,26	19.183.584.331,26	1	RUTIN	186.336.774.000,00	175.960.709.677,39
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	33.125.458.598,74	40.352.592.890,43		a. Belanja Pegawai	140.821.096.109,00	142.335.453.916,90
	a. Pajak Daerah	17.814.447.519,50	22.886.374.632,50		b. Belanja Barang	23.260.338.407,00	21.595.467.694,00
	b. Retribusi Daerah	11.503.842.081,00	11.773.895.343,16		c. Belanja Pemeliharaan	5.861.979.439,00	5.641.966.729,00
	c. Laba Perusahaan Milik Daerah&Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	2.249.570.045,51	2.249.570.025,31		d. Belanja Perjalanan Dinas	2.865.320.373,00	2.672.404.600,00
	d. Lain-lain PAD Yg Sah	1.557.598.952,73	3.442.752.889,46		e. Angsuran Hutang dan Bunga	2.374.053.178,00	2.312.394.074,49
3	DANAPERIMBANGAN	153.014.249.000,00	167.269.506.353,29		f. Pensiun dan Onderstand	0,00	0,00
					g. Bantuan Keuangan	662.900.510,00	662.900.510,00
					h. Pengeluaran Yg Tidak Termasuk Bagian Lain	816.587.500,00	632.461.153,00
					i. Pengeluaran Tidak Tersangka	9.674.498.484,00	107.661.000,00

	a. Bagi Hasil Pajak	17.872.784.000,00	32.634.378.613,29	2	PEMBANGUNAN	19.130.241.000,00	16.453.251.437,00
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	1.220.000.000,00	483.655.406,00				
	c. Dana Alokasi Umum	113.438.727.000,00	113.437.221.225,00				
	d. Dana Alokasi Khusus	20.482.738.000,00	20.714.251.109,00				
	e. Dana Darurat	0,00	0,00				
4	PINJAMAN DAERAH	0,00	0,00				
5	LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	143.723.070,00	203.486.495,00		Sisa Perhitungan TA.2001		35.596.366.520,59
	JUMLAH	205.467.015.000,00	227.009.170.069,98		JUMLAH	205.467.015.000,00	227.009.170.069,98

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta

Lampiran 2

**RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2002**

NO	PENDAPATAN	JUMLAH		NO	BELANJA	JUMLAH	
		ANGGARAN	REALISASI			ANGGARAN	REALISASI
1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	34.595.208.955,59	35.596.366.520,69	1	RUTIN	249.283.379.386,00	190.827.224.760,01
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	49.685.313.410,17	56.377.459.398,89		a. Belanja Pegawai	167.594.997.525,00	135.393.683.816,00
	a. Pajak Daerah	27.107.396.233,00	30.517.591.845,50		b. Belanja Barang	30.236.812.172,00	27.899.625.010,00
	b. Retribusi Daerah	13.991.791.110,00	14.193.457.159,11		c. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	8.431.708.772,00	8.147.911.989,00
	c. Laba Perusahaan Milik Daerah&Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	2.509.234.852,65	2.509.234.852,65		d. Belanja Perjalanan Dinas	2.389.148.210,00	2.110.625.725,00
	d. Lain-lain PAD Yg Sah	6.076.891.214,52	9.157.175.541,63		e. Belanja Lain-lain	14.055.456.539,00	12.977.997.388,25
					f. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	2.228.011.389,00	2.223.800.069,76
					g. Bagian Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	0,00	0,00
3	DANAPERIMBANGAN	185.333.797.889,24	187.968.763.862,24		h. Pengeluaran Yg Tidak Termasuk Bagian Lain	1.652.065.503,00	1.557.798.332,00

	a. Bagi Hasil Pajak	21.985.125.317,00	24.744.094.790,00		i. Pengeluaran Tidak Tersangka	22.695.179.276,00	495.782.450,00
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	808.672.572,24	350.156.572,24				
	c. Dana Alokasi Umum	162.540.000.000,00	162.874.512.500,00				
	d. Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00				
	e. Dana Darurat	0,00	0,00				
4	PINJAMAN DAERAH	0,00	0,00	2	PEMBANGUNAN	37.790.158.614,00	33.998.267.081,00
5	LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	17.459.217.745,00	23.077.480.755,96		Sisa Perhitungan TA.2002		78.194.578.696,67
	JUMLAH	287.073.538.000,00	303.020.070.537,68		JUMLAH	287.073.538.000,00	303.020.070.537,00

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta

Lampiran 3

**RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2003**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
I	PENDAPATAN		
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 56.822.010.000,00	Rp 68.621.564.311,07
	a. Pajak Daerah	32.068.358.000,00	33.526.514.267,53
	b. Retribusi Daerah	15.718.585.000,00	16.093.220.398,50
	c. Bagian Laba Usaha Daerah	2.509.235.000,00	4.081.649.388,86
	d. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	6.525.832.000,00	14.920.180.256,18
2.	Dana Perimbangan	Rp 238.756.313.000,00	Rp 253.512.731.343,07
	a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	25.458.673.000,00	32.300.731.328,00
	b. Dana Alokasi Umum	196.100.000.000,00	196.100.000.000,00
	c. Dana Alokasi Khusus	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00
	d. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	12.997.640.000,00	20.912.000.015,07
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 7.841.710.000,00	Rp 16.496.466.000,00
	Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dari Pemerintah	7.841.710.000,00	16.496.466.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 303.420.033.000,00	Rp 338.630.761.654,14

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
II	BELANJA		
1.	APARATUR DAERAH	Rp 62.807.668.122,00	Rp 52.950.512.131,94
	a. Belanja Administrasi Umum	26.581.832.882,00	19.447.043.068,94
	b. Belanja Operasi & Pemeliharaan	18.366.162.540,00	16.480.358.307,00
	c. Belanja Modal	17.859.681.700,00	17.023.110.756,00
2.	PELAYANAN PUBLIK	Rp 284.849.295.261,00	Rp 252.400.520.295,50
	a. Belanja Administrasi Umum	186.898.710.462,00	166.942.266.025,00
	b. Belanja Operasi & Pemeliharaan	28.550.000.880,00	26.813.257.737,50
	c. Belanja Modal	46.128.974.703,00	41.117.455.909,00
	d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	17.671.609.216,00	17.172.995.474,00
	e. Belanja Tidak Tersangka	5.600.000.000,00	354.545.150,00
	JUMLAH BELANJA	Rp 347.656.963.383,00	Rp 305.351.032.427,44
	Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN-BELANJA)	Rp (44.236.930.383,00)	Rp 33.279.729.226,70

NO	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	
III	PEMBIAYAAN				
1.	Penerimaan Daerah				
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA.2002	Rp	57.869.791.627,00	Rp	57.456.145.471,67
	b. Transfer dari Dana Cadangan		0,00		0,00
	c. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		0,00		0,00
	d. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan		10.769.529.417,00		0,00
	e. Hibah				10.769.529.417,00
	Jumlah Penerimaan Daerah	Rp	68.639.321.044,00	Rp	68.225.674.888,67
2.	Pengeluaran Daerah				
	a. Transfer Ke Dana Cadangan	Rp	5.530.465.622,00	Rp	5.530.465.622,00
	b. Penyertaan Modal		17.839.529.417,00		17.836.550.642,20
	c. Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo		1.032.395.622,00		1.000.431.870,30
	d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA.2003		0,00		77.137.955.980,87
	Jumlah Pengeluaran Daerah	Rp	24.402.390.661,00	Rp	101.505.404.115,37
	Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN-BELANJA)	Rp	44.236.930.383,00	Rp	(33.279.729.226,70)

Sumber: BPKD Kota Yogyakarta

Lampiran 4

**RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2004**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
I	PENDAPATAN		
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 70.412.081.000,00	Rp 79.911.419.100,82
	a. Pajak Daerah	38.149.900.000,00	40.581.980.256,00
	b. Retribusi Daerah	18.269.452.000,00	18.995.046.383,00
	c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.188.903.000,00	5.285.786.650,47
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	8.803.826.000,00	15.048.605.811,35
2.	Dana Perimbangan	Rp 252.390.201.000,00	Rp 269.967.630.200,69
	a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	29.583.201.000,00	37.889.440.614,00
	b. Dana Alokasi Umum	197.787.000.000,00	197.787.000.000,00
	c. Dana Alokasi Khusus	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
	d. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	19.520.000.000,00	28.791.189.586,69
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 18.342.100.000,00	Rp 19.770.829.733,00
	a. Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dari Pemerintah	5.043.100.000,00	6.471.829.733,00
	b. Dana Penyesuaian Ad Hoc	13.299.000.000,00	13.299.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 341.144.382.000,00	Rp 369.649.879.034,51

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
II	BELANJA		
1.	APARATUR DAERAH	Rp 65.747.492.220,00	Rp 58.351.605.850,29
	a. Belanja Administrasi Umum	32.042.509.295,00	29.273.749.713,29
	b. Belanja Operasi & Pemeliharaan	21.210.632.125,00	18.633.614.620,00
	c. Belanja Modal	12.494.350.800,00	10.444.241.517,00
2.	PELAYANAN PUBLIK	Rp 349.459.699.097,00	Rp 311.988.969.919,75
	a. Belanja Administrasi Umum	210.531.212.085,00	188.939.446.086,75
	b. Belanja Operasi & Pemeliharaan	38.887.655.965,00	36.817.724.255,00
	c. Belanja Modal	56.004.154.896,00	50.260.339.372,00
	d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	32.036.676.151,00	30.974.792.481,00
	e. Belanja Tidak Tersangka	12.000.000.000,00	4.996.667.725,00
	JUMLAH BELANJA	Rp 415.207.191.317,00	Rp 370.340.575.770,04
	Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN-BELANJA)	Rp (74.062.809.317,00)	Rp (690.696.735,53)



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209 - 217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. : (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 2133

Membaca Surat : Dekan Fak. Ekonomi-USD Yk No : 31/Kaprodi AKt/039/II/2006
Tanggal : 23-02-2006 Perihal : Ijin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : KRISTINA WIDAYANINGSIH No. MHSW : 022114009
Alamat Instansi : Mrican Tromol Pos 29, Yogyakarta
Judul : EVALUASI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta)

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 21-04-2006 s/d 21-07-2006

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Dinas Perizinan;
3. Ka. BPKD Prop. DIY;
4. Dekan Fak. Ekonomi-IJSD Yk;
5. Pertinggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21-04-2006

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
U.b. ~~KEPALA BIDANG PENGENDALIAN~~





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

NOMOR : 070/796
1785/34

Dasar Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor : 070/2133 Tanggal : 21/04/2006

Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN /PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan Kepada Nama : KRISTINA WIDAYANINGSIH NO MHS / NIM : 022114009
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - USD
Alamat : Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. Edi Kustanto, MM
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: EVALUASI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) (Studi kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : 21/04/2006 Sampai 21/07/2006

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

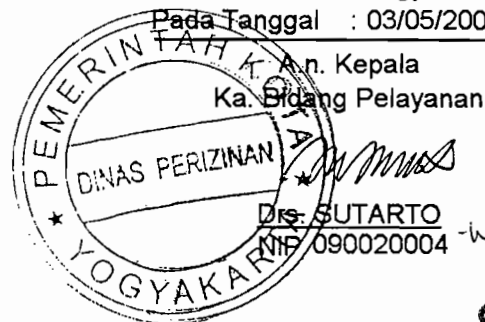
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

KRISTINA WIDAYANINGSIH

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 03/05/2006

Ka. Kepala
Ka. Bidang Pelayanan



Drs. SUTARTO
NIP. 090020004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. BPKD Kota Yogyakarta
4. Yang bersangkutan.

